

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 182 (seratus delapan puluh dua) nagari dengan total penduduk sebesar 453.822 jiwa sampai dengan tahun 2016. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 47 pulau. Secara geografis terletak di bagian Barat garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara $100^{\circ} 19' - 101^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara $0^{\circ} 59' - 2^{\circ} 28,6'$ Lintang Utara/Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia yang memiliki wilayah seluas 5,749,89 km². Secara klimatologis.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pola tipe curah hujan tipe sedang, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Secara historis perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tergantung pada sektor Pertanian yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2016 peranannya turun dari 41,65% menjadi 40,55%. Penurunan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan Pergudangan juga mengalami penurunan, akhirnya penyediaan Akomodasi dan Makan minum mengalami kenaikan peranannya. Selain sektor Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Transportasi dan Pergudangan, penyediaan

Akomodasi dan Makan minum, sektor yang mengalami kenaikan tahun 2016 adalah sektor Industri Pengolahan, yaitu dari 8,06% menjadi 8,14%; sektor Konstruksi dari 9,42% menjadi 9,51%; dan sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 11,23% menjadi 11,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan *World Food Programme* (WFP) mengembangkan bersama-sama Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) pada tahun 2005, pada waktu itu masih dengan nama Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*). Peluncuran FIA 2005 tingkat nasional ternyata masih menyebabkan kesalah pahaman mengenai pengertian pemeringkatan kabupaten “rawan pangan”. Kata kerawanan pangan (*food insecurity*) diindikasikan secara langsung bahwa kabupaten-kabupaten peringkat bawah adalah kabupaten yang semua penduduknya rawan pangan. Kemudian pada tahun 2009, Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) berubah menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tersebut. Perubahan FIA menjadi FSVA dilakukan dengan pertimbangan untuk memperjelas pengertian mengenai konsep ketahanan pangan berdasarkan tiga dimensi ketahanan pangan (ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan) dalam semua kondisi bukan hanya pada situasi kerawanan pangan saja.

FSVA juga bertujuan untuk mengetahui berbagai penyebab kerawanan pangan secara lebih baik atau dengan kata lain kerentanan terhadap kerawanan pangan, bukan hanya kerawanan itu sendiri. Oleh karena itu, Tim Pengarah sepakat untuk menggunakan judul “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA)”

FSVA Nasional 2009 mencakup 346 kabupaten dari 32 provinsi yang diluncurkan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Badan Ketahanan

Pangan (BKP) Provinsi bekerjasama dengan *World Food Programme* (WFP). FSVA 2009 diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2010 dan dijadikan sebagai alat yang penting dalam melakukan pentargetan wilayah kabupaten yang paling rawan untuk intervensi ketahanan pangan dan gizi. Pada tahun 2010 dan 2011 penyusunan FSVA ada di tingkat provinsi dimana analisisnya dipertajam sampai level kecamatan. Penyusunan FIA 2005, FSVA Nasional 2009 dan FSVA Provinsi 2010 dan 2011, wilayah perkotaan tidak diikutsertakan sebab ketahanan pangan perkotaan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kabupaten sehingga perlu dianalisa secara terpisah.

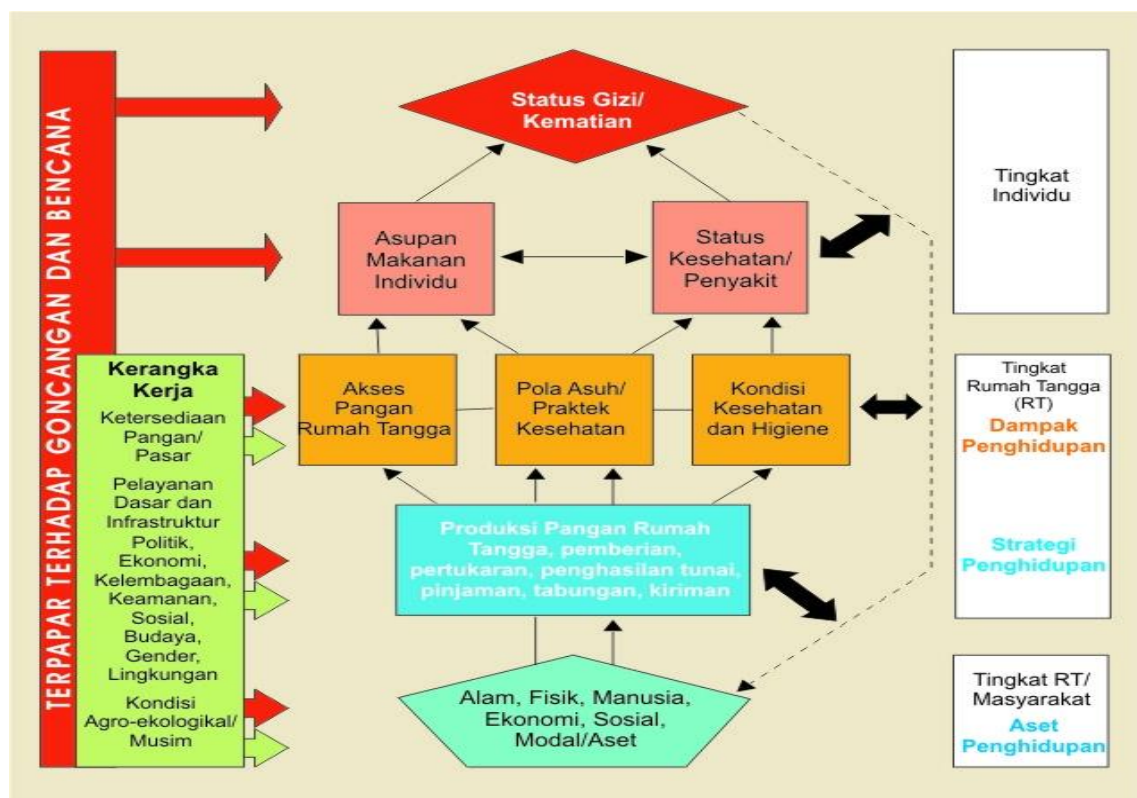
Pada tahun 2012, FSVA dilanjutkan dengan FSVA Kabupaten dengan tingkat analisis sampai tingkat desa/ nagari. FSVA Kabupaten ini menggunakan indikator yang berbeda dengan FSVA Nasional maupun FSVA Provinsi karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu karakteristik desa berbeda dengan karakteristik kabupaten dan kecamatan, serta ketersediaan data sampai tingkat desa.

Walaupun FIA dan FSVA berhasil mengungkap perbedaan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi di Indonesia tetapi belum ada alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat desa. Penyusunan FSVA sampai tingkat desa dikembangkan sebagai suatu alat baru yang dipergunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi desa yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal ketahanan pangan dan gizi. Pengembangan FSVA tingkat desa dianggap hal penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan merupakan tantangan besar.

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan Dan Gizi

Pada *World Food Summit* (1996), **Ketahanan Pangan** didefinisikan sebagai: “Ketahanan pangan terjadi jika semua orang secara terus-menerus, baik secara fisik, sosial dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat”.

Pada FSVA Provinsi, analisis dan pemetaan dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1)



Gambar 1.1 Kerangka Konsep Ketahanan dan Kerentanan Pangan

a. Ketahanan Pangan

Di Indonesia, Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Seperti FIA Nasional 2005, FSVA Nasional 2009, FSVA Provinsi 2010 dan 2011, FSVA Kabupaten 2012 dibuat berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang di peroleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya, budaya atau kebiasaan pemberian makanan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga.

Produksi dan ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pangan mungkin tersedia dan dapat diakses namun sebagian anggota rumah tangga mungkin tidak mendapat manfaat secara maksimal apabila kelompok ini tidak memperoleh distribusi pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun keragaman atau apabila kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan penyerapan makanan karena penyiapan makanan yang tidak tepat atau karena sedang sakit.

Kerangka konsep ketahanan pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan serta menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan aset rumah tangga, strategi penghidupan, dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dengan kata lain, status ketahanan pangan suatu rumah tangga, atau individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (*agro-environmental*), sosial ekonomi dan biologi dan bahkan faktor politik.

Kerawanan pangan dapat bersifat kronis atau sementara/transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang atau yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Keadaan ini biasanya terkait dengan faktor struktural, yang tidak dapat berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, system pemerintahan daerah, kepemilikan lahan, hubungan antar etnis, tingkat pendidikan, dll. Kerawanan Pangan Sementara adalah ketidakmampuan jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Keadaan ini biasanya terkait dengan faktor dinamis yang berubah dengan cepat seperti penyakit infeksi, bencana alam, pengungsian, berubahnya fungsi pasar, tingkat besarnya hutang, perpindahan penduduk (migrasi) dll. Kerawanan pangan yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan menurunnya kualitas

penghidupan rumah tangga, menurunnya daya tahan dan bahkan bias berubah menjadi kerawanan pangan kronis.

b. Ketahanan Gizi

Ketahanan gizi didefinisikan sebagai “akses fisik, ekonomi, lingkungan dan social terhadap asupan makanan seimbang, air layak minum, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar”. Ini berarti bahwa ketahanan gizi membutuhkan kombinasi dari komponen makanan dan non-makanan.

Ketahanan gizi yang ditunjukkan oleh status gizi merupakan tujuan akhir dari ketahanan pangan, kesehatan dan pola asuh tingkat individu. Kerawanan pangan adalah salah satu dari tiga penyebab utama. Penyebab utama lainnya kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat dan pola asuh. Oleh karena itu dimana pun terjadi kerawanan pangan, maka akan beresiko kekurangan gizi, termasuk kekurangan gizi mikro. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kerawanan pangan adalah penyebab satu-satunya masalah gizi kurang, tanpa mempertimbangkan faktor kesehatan dan pola asuh seperti kurangnya akses ke air layak minum, sanitasi, fasilitas dan pelayanan kesehatan, rendahnya kualitas pola asuh dan pemberian makan anak serta tingkat pendidikan ibu.

c. Kerentanan

Kerentanan terhadap kerawanan pangan mengacu pada suatu kondisi yang membuat suatu masyarakat yang beresiko rawan pangan menjadi rawan pangan. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat keterpaparan mereka terhadap faktor-faktor resiko/goncangan dan kemampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut baik dalam kondisi tertekan maupun tidak.

1.3 Indikator Yang Digunakan FSVA Kabupaten

Kerawanan Pangan merupakan isu multi-dimensional yang memerlukan analisis dari berbagai parameter tidak hanya produksi dan ketersediaan

pangan saja. Meskipun tidak ada cara spesifik untuk mengukur ketahanan pangan, kompleksitas ketahanan pangan dapat disederhanakan dengan menitik beratkan pada tiga dimensi yang berbeda namun saling berkaitan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan oleh rumah tangga dan pemanfaatan pangan oleh individu.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing. Tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan sampai tingkat kabupaten. Indikator yang dipilih dalam FSVA Kabupaten ini berkaitan dengan tiga pilar ketahanan pangan berdasarkan konsepsi Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi. Disamping itu, pemilihan indikator juga tergantung pada ketersediaan data pada tingkat desa.

FSVA Kabupaten ini menggunakan indikator yang berbeda dengan FSVA Nasional maupun FSVA Provinsi karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu karakteristik Nagari serta ketersediaan data sampai tingkat nagari.

Dalam aspek ketersediaan, rasio konsumsi terhadap ketersediaan bersih serelia diganti dengan jumlah warung/toko. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan data produksi sampai level Nagari untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Namun data produksi sampai level kecamatan tetap dianalisis dan dijelaskan dalam laporan secara deskriptif. Indikator dalam aspek pemanfaatan pangan menjadi 3 indikator dimana indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan persentase perempuan buta huruf tidak dimasukkan karena tidak tersedia data sampai level Nagari.

FSVA Kabupaten ini dikembangkan dengan menggunakan 6 indikator kerawanan pangan kronis dan indikator kerawanan pangan sementara/transien. Peta komposit ketahanan dan kerentanan pangan dibuat dengan mengkombinasikan 6 indikator kerawanan

pangan kronis berdasarkan analisis *Principal Component Analysis* dan *Cluster Analysis*.

Seluruh data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari PODES (Potensi Desa), Badan Pusat Statistik; PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) di bawah koordinasi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Badan Ketahanan Pangan kabupaten.

Peta-peta dibuat dengan menggunakan pola warna yang seragam yaitu gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan dan gradasi warna hijau menggambarkan kondisi yang lebih baik. Pada kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ketahanan atau kerawanan pangan. Klasifikasi data pada peta untuk indikator individu menggunakan range 30 % batas atas dan batas bawah.

Tabel 1. Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan 2017

Indikator	Definisi dan Perhitungan	Sumber Data
Ketersediaan Pangan		
1. Jumlah warung atau toko kelontong	Jumlah warung/toko kelontong (tempat usaha untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran)	PODES, BPS
Akses Pangan dan Mata Pencapaian		
2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan		BPS
3. Akses penghubung yang memadai	Jalan utama desa yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih: 1. Sepanjang tahun 2. Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) 3. Sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan 4. Tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun	PODES, BPS, PU

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator.	PODES, BPS
Pemanfaatan Pangan		
5. Jumlah sarana /fasilitas kesehatan	Jumlah sarana kesehatan yang ada di desa: rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, puskesmas pembantu, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, poskesdes (pos kesehatan desa), polindes (pondok bersalin desa), posyandu, apotek.	PODES, BPS
6. Jumlah penderita gizi buruk	Jumlah penderita gizi buruk (tanda-tanda berat dan tinggi badan sangat kurang & tidak sesuai umur, harus dinyatakan oleh tenaga medis)	PODES, BPS
7. Jumlah kematian balita dan ibu melahirkan	Jumlah kematian warga selama setahun terakhir: 1. balita (usia dibawah 5 tahun) 2. ibu pada masa kehamilan, persalinan atau nifas (40 hari setelah persalinan)	PODES, BPS

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan yang berasal dari perdagangan pangan dilaksanakan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Produksi pangan tergantung dari berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan dan bahkan inisiatif dari para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Pangan meliputi produk sereal, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah gula, dan produk hewani. Karena kebutuhan utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, yaitu sekitar separuh dan kebutuhan energy per orang per hari, maka yang digunakan dalam analisa kecukupan pangan yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok sereal, yaitu padi, jagung dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memahami tingkat kecukupan pangan pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

2.1 Produksi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 40,55% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan yang menyumbang, produksi padi sawah produksinya sebanyak 270.221 ton dan

produksi tanaman palawija selama tahun 2016 sebesar 168.887 ton. Berdasarkan Tabel 1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi meningkat selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015, sedangkan pencapaian produksi tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015, yakni pada tahun 2015 sebesar 317.373 ton, sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 270.221 ton.

Tabel 2. Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2013-2016 (Ton)

SERELIA	PRODUKSI (TON)			
	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016
Padi	269.272	313.654	317.373	270.221
Jagung	105.036	107.695	108.894	158.159
Ubi Kayu	8.681	13.386	15.263	9.892
Ubi Jalar	1.166	1.141	1.657	410
JUMLAH	384.155	435.876	443.187	438.682

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2017, BPS

Tahun 2014, total produksi serealial dan umbi-umbian mencapai 435.876 ton. padi, 313.705 ton jagung, 107.695 ton ubi kayu, 13.386 ton dan ubi jalar 1.141 ton. Sebaran total produksi serealial selama 4 tahun terbesar terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 443.187 ton dan terkecil pada tahun 2013 hanya sebesar 384.155 ton.

a. Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 4 tahun terakhir (2013-2016) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 3. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2016 di 8 kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan Koto XI Tarusan, , Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Air Pura, Pancung Soal, Ranah IV Hulu Tapan, dan Lunang. Produksi padi tertinggi di kecamatan Lengayang sebesar 30.321,80 ton.

Tabel 3. Produksi Padi 2013 - 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI TOTAL SEREALIA (TON)			
		PADI			
		TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
1	Koto XI Tarusan	24.289	27.161	24.167,00	19.448,50
2	Bayang	29.391	27.155	32.347,00	28.177,60
3	IV Nagari Bayang Utara	6.891	10.649	7.008,00	7.584,10
4	IV Jurai	15.572	11.782	14.583,00	10.629,90
5	Batang Kapas	21.404	19.520	21.457,00	21.932,30
6	Sutera	30.294	40.579	29.598,00	24.983,30
7	Lengayang	32.143	33.687	43.101,00	30.321,80
8	Ranah Pesisir	29.328	32.698	39.809,00	24.464,40
9	Linggo Sari Baganti	20.042	23.951	28.979,00	28.429,00
10	Air Pura	7.010	16.090	17.114,00	10.855,60
11	Pancung Soal	21.029	24.543	14.126,00	23.464,90
12	Basa IV Balai Tapan	12.245	15.103	9.523,00	7.280,50
13	Ranah IV Hulu Tapan	11.842	12.391	10.999,00	11.829,90
14	Lunang	7.884	18.394	24.562,00	20.819,21
15	Silaut	-	-	-	-
	TOTAL	269.364	313.704	317.373,00	270.221,00

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2017

b. Jagung

Pada tahun 2016, produksi jagung mencapai 158.159,50 ton. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 49% yang awalnya pada tahun 2015 hanya 108.894,00 ton. peningkatan produksi pada tahun 2016 disebabkan pola tanam petani yang berada pada tanam jagung dan juga dikarenakan cuaca yang sangat mendukung untuk budidaya jagung dan adanya penambahan lahan dan penggunaan teknologi budidaya. Luas tanam jagung terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 5.800 Ha padaa Kecamatan Airpura dan diikuti oleh Kecamatan Pancung Soal sebesar 3.672 Ha. Luas Tanam terendah pada Kecamatan IV Ngari Utara hanya seluas 16 Ha dan disusul Kecamatan Koto XI Tarusan yang hanya seluas 26 Ha. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Produksi Jagung 2013 - 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI TOTAL SEREALIA (TON)			
		JAGUNG			
		2013	2014	2015	2016
1	Koto XI Tarusan	200	287	128,00	93,70
2	Bayang	2.289	1.633	547,00	2.387,20
3	IV Nagari Bayang Utara	250	105	113,00	102,90
4	IV Jurai	892	656	134,00	371,70
5	Batang Kapas	1.178	768	1.157,00	1.605,50
6	Sutera	2.319	1.566	2.052,00	7.354,40
7	Lengayang	818	739	392,00	2.544,70
8	Ranah Pesisir	11.034	3.103	5.868,00	13.069,30
9	Linggo Sari Baganti	11.666	11.091	16.197,00	19.667,70
10	Air Pura	22.253	17.799	31.193,00	42.006,20
11	Pancung Soal	18.207	33.197	27.550,00	28.542,30
12	Basa IV Balai Tapan	17.040	4.439	4.953,00	10.513,60
13	Ranah IV Hulu Tapan	7.303	13.387	3.355,00	8.802,10
14	Lunang	9.108	14.110	9.345,00	16.905,90
15	Silaut	479	4.815	5.910,00	4.192,30
	TOTAL	105.036	107.695	108.894,00	158.159,50

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2013-2016, BPS

c. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu mengalami penurunan dari 15.263,00 ton pada tahun 2015 menjadi 9.892,64 ton pada tahun 2016. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2014 meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera. Rincian produksi ubi kayu tahun 2013-2016 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 5. Produksi Ubi Kayu 2013 - 2016 (Ton)

NO	KECAMATAN	PRODUKSI TOTAL SEREALIA			
		UBI KAYU			
		2013	2014	2015	2016
1	Koto XI Tarusan	3.148	5.246	6.156,00	4.031,90
2	Bayang	611	1.106	1.007,00	845,34
3	IV Nagari Bayang Utara	315	277	215,00	194,87

4	IV Jurai	248	418	536,00	194,87
5	Batang Kapas	181	347	353,00	368,94
6	Sutera	1.040	958	1.402,00	1.255,66
7	Lengayang	700	938	1.537,00	631,99
8	Ranah Pesisir	134	163	108,00	77,61
9	Linggo Sari Baganti	1.062	1.210	1.559,00	194,87
10	Air Pura	203	160	199,00	249,95
11	Pancung Soal	45	122	-	-
12	Basa IV Balai Tapan	113	263	534,00	-
13	Ranah IV Hulu Tapan	226	578	-	-
14	Lunang	384	1.031	1.436,00	1.759,61
15	Silaut	271	569	401,00	87,03
	TOTAL	8.681	13.386	15.263,00	9.892,64

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2017.

d. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini yakni pada tahun 2015 - 2016 berturut-turut pada kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Kecamatan Koto XI tarusan merupakan penyumbang terbesar dalam hal produksi Ubi Kayu ini yakni sebesar 170,84 ton yang diikuti oleh Kecamatan Silaut sebesar 102,67 ton. Produksi ubi jalar tahun 2013 - 2016 disajikan pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Produksi Ubi Jalar 2013 - 2016

NO	KECAMATAN	PRODUKSI TOTAL SEREALIA			
		UBI JALAR (Ton)			
		2013	2014	2015	2016
1	Koto XI Tarusan	35	174	207,00	170,84
2	Bayang	261	188	-	-
3	IV Nagari Bayang Utara	52	64	553,00	-
4	IV Jurai	35	199	138,00	68,33
5	Batang Kapas	0	0	-	-
6	Sutera	313	215	207,00	-
7	Lengayang	0	0	-	-
8	Ranah Pesisir	0	12	-	-

9	Linggo Sari Baganti	191	81	-	-
10	Air Pura	0	0	-	-
11	Pancung Soal	17	0	-	-
12	Basa IV Balai Tapan	191	0	-	-
13	Ranah IV Hulu Tapan	0	64	69	-
14	Lunang	0	64	276,00	68,34
15	Silaut	70	80	207,00	102,67
	TOTAL	1.165	1.141	1.657,00	410,01

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2017

2.2 Jumlah Warung/Toko

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa indikator ketersediaan pangan yang digunakan dalam analisis ketahanan pangan komposit adalah jumlah warung/toko. Jumlah warung/toko tersebut menunjukkan apakah suatu wilayah tersedia atau tidak penyedia pangan.

Tabel 7. Jumlah Jumlah Warung/Toko per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH TOKO/ WARUNG
1	Koto XI Tarusan	362
2	Bayang	282
3	IV Nagari Bayang Utara	103
4	IV Jurai	249
5	Batang Kapas	111
6	Sutera	266
7	Lengayang	174
8	Ranah Pesisir	225
9	Linggo Sari Baganti	336
10	Air Pura	177
11	Pancung Soal	106
12	Basa IV Balai Tapan	154
13	Ranah IV Hulu Tapan	295

14	Lunang	245
15	Silaut	194
TOTAL		3.233

Sumber: Dinas Kopperindag, UMKM Pesisir Selatan

2.3 Tantangan Utama Pemenuhan Kecukupan

Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan mengenai ketersediaan pangan pada periode 2013-2016 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produktivitas

- a) Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT)
- b) Perbaikan penggunaan varietas tanaman
- c) Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
- d) Pengelolaan air
- e) Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian.

b. Perluasan lahan sawah

- a) Pengembangan lahan sawah
- b) Optimalisasi penggunaan lahan
- c) Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
- d) Pembangunan sumur pompa dan dam/embung.

c. Pengurangan dampak iklim terkait resiko

- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- b) Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen.

- d. Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a) Kredit dan energi untuk ketahanan pangan (KKP-E)
 - b) Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat (LM3)
 - c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN DAN PENGHIDUPAN

Akses terhadap pangan merupakan salah satu dari 3 pilar yang dianalisis dalam FIA 2005, FSVA 2009, FSVA Provinsi 2010 - 2011 dan FSVA Kabupaten Pesisir Selatan. Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Akses pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut.

Penghidupan terdiri dari kemampuan rumahtangga, modal/aset (sumberdaya alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tidak berkecukupan, tidak stabilnya daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan mereka tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan pangan.

Secara global, penduduk yang tingkat pendapatan per kapitanya di bawah US\$ 1,25 (*Purchasing Power Parity*) per hari menurut Bank Dunia, dikelompokkan sebagai penduduk miskin. Pemerintah Indonesia menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar Rp. 200.262,-/orang/bulan pada tahun 2009 (sekitar US\$ 22) untuk keperluan perencanaan. Berdasarkan harga kebutuhan pokok di tingkat provinsi, garis kemiskinan yang digunakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 166.697,-/orang/bulan tahun 2015. Semakin besar jumlah penduduk miskin di suatu wilayah maka akses terhadap pangan akan semakin rendah dan angka kerawanan pangan akan semakin tinggi.

3.1 Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dari 8,46% tahun 2015 menjadi 7,92% tahun 2016.

Tabel 8. Persentase Indikator Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan	Tahun	
	2015	2016
Persentase penduduk miskin (000)	38,13	35,86
Persentase Penduduk miskin	8,46	7,92

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2017, BPS

3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sejak tahun 2005, Sakernas dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Dalam rangka menyesuaikan dengan konsep baru dari Organisasi Tenaga Kerja International (ILO), maka konsep status ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka telah diperluas sejak Sakernas tahun 2005. Total angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang pada minggu lalu bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran (sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha).

Tabel 9 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan Jumlah Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha pada tahun 2016 berjumlah 155.894 jiwa. Pada sektor Pertanian sebesar 75.603 jiwa, Industri Pengolahan 8,342 Jiwa, Perdagangan dan Hotel dan Restoran 24.079 Jiwa, Jasa 28.750 Jiwa dan Lainnya 19.120 Jiwa.

Tabel 9. Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang bekerja
di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA	PERSENTASE
1	Pertanian	75.603	48,50
2	Industri Pengolahan	8.342	5,35
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	24.079	15,45
4	Jasa-jasa	28.750	18,44
5	Lainnya	19.120	12,26
	TOTAL	155.894	100,00

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2017

3.3 Akses Terhadap Infrastruktur

Kabupaten Pesisir Selatan telah melengkapi dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk akses masyarakat, melalui dana yang ada di Nagari telah membuka akses dan menyediakan jalan yang sesuai standar untuk bisa dilalui oleh masyarakat. Kekurangannya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) dan masih tinggi harga sarana produksi pertanian di daerah perdesaan, bila dibandingkan dengan harga di perkotaan harga untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau

diproses) masih jauh perbandingannya. Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor (mobilisasi) melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai.

Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS dan PU, di Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

3.4 Akses Terhadap Infrastruktur (LISTRIK)

Akses listrik merupakan suatu indikator yang baik untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi dan peluang penghidupan di suatu daerah. Tersedianya listrik di tingkat rumah tangga dapat memberikan peluang bagi peningkatan kondisi kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan data BPS tahun 2017 bahwa pada tahun 2016 terdapat 55.178 pelanggan yang telah teraliri listrik dan berdasarkan PODES (Potensi Desa) 2014 terdapat 6,5% rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum memiliki akses terhadap listrik. Tabel 10 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik tertinggi terdapat di Kecamatan Pancung Soal (16,83%), kemudian

disusul Kecamatan Air Pura (14,41%) dan Kecamatan Linggo Sari Baganti (10,98%). Sementara rumah tangga tanpa akses listrik terendah terdapat di Kecamatan Bayang (0,99%), Kecamatan Lunang (1,71%) Kecamatan IV Jurai (2,1%).

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PERSENTASE RT TANPA AKSES LISTRIK
1	KOTO XI TARUSAN	6,41
2	BAYANG	0,99
3	BAYANG UTARA	2,14
4	IV JURAI	2,10
5	BATANG KAPAS	4,44
6	SUTERA	4,70
7	LENGAYANG	10,43
8	RANAH PESISIR	6,79
9	LINGGO SARI BANGANTI	10,98
10	PANCUNG SOAL	16,83
11	AIR PURA	14,41
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,72
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,72
14	LUNANG	1,71
15	SILAUT	6,16
	TOTAL	6,50

Sumber: Badan Pusat Statistik_2015

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: a) Penggunaan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga; b) Kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan oleh rumah tangga tergantung pada: (i) fasilitas penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan yang dimiliki oleh rumah tangga termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi hygiene; (ii) pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan penyiapan makanan, pemberian makan untuk balita dan anggota keluarga lainnya termasuk yang sedang sakit atau sudah tua yang mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan yang rendah dari budaya pengasuh, adat/kepercayaan dan tabu; (iii) distribusi makanan dalam keluarga; (iv) kondisi kesehatan masing-masing individu dipengaruhi oleh penyakit, hygiene, air dan sanitasi yang buruk dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan.

4.1 Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan

Tabel 11 menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik/ balai pengobatan, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, praktek bidan, poskesdes, polides, posyandu, apotek. Secara umum setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Rumah sakit terdapat di 1 kecamatan, yaitu Kecamatan IV Jurai dan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ada di setiap kecamatan serta POSKESRI di setiap Nagari yang telah ada bangunannya dan ditempati oleh pada Bidan.

**Tabel 11. Jumlah Sarana Kesehatan per Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	POSYANDU
1	Koto XI Tarusan	2	10	71
2	Bayang	2	5	66
3	IV Nagari Bayang Utara	1	4	19
4	IV Jurai	2	7	70
5	Batang Kapas	2	7	53
6	Sutera	2	7	68
7	Lengayang	2	11	89
8	Ranah Pesisir	1	8	46
9	Linggo Sari Baganti	1	8	40
10	Air Pura	-	3	-
11	Pancung Soal	1	6	38
12	Basa IV Balai Tapan	1	4	46
13	Ranah IV Hulu Tapan	-	1	-
14	Lunang	1	5	22
15	Silaut	1	5	22
TOTAL		18	91	650

Sumber : Badan Pusat Statistik_ 2017

4.2 Status Gizi

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

- 1) Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan score dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
- 2) Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan score kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan

- 3) Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Tabel 12. Penderita Gizi Buruk dengan 3 Indikator Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDERITA GIZI BURUK DENGAN 3 INDIKATOR (BB/U, TB/U, BB/TB)
1	Koto XI Tarusan	17
2	Bayang	1
3	IV Nagari Bayang Utara	3
4	IV Jurai	14
5	Batang Kapas	7
6	Sutera	3
7	Lengayang	4
8	Ranah Pesisir	3
9	Linggo Sari Baganti	11
10	Air Pura	--
11	Pancung Soal	4
12	Basa IV Balai Tapan	7
13	Ranah IV Hulu Tapan	--
14	Lunang	--
15	Silaut	6
TOTAL		70

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Data SKPG)

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan

Masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi :

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk :
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun.

Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - ✓ Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - ✓ Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6

bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.

- ✓ Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- ✓ Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
- ✓ Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
- ✓ Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya

produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN KETERSEDIAAN BERDASARKAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 7 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab II, III dan IV. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit ditetapkan melalui Analisis Komponen Utama (*Principal Component analysis*) dan Analisis Kelompok (*Cluster Analysis*).

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil PCA dan Cluster Analysis, kecamatan-kecamatan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas: Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3, Prioritas 4, Prioritas 5, dan Prioritas 6. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kecamatan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kecamatan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kecamatan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kecamatan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 182 nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan maka didapatkan 6 Nagari menjadi Prioritas 1, 21 Nagari menjadi Prioritas 2, 89 Nagari menjadi Prioritas 3, 66 Nagari menjadi Prioritas 4.

Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah antara lain :

- ✓ Kecamatan Koto XI Tarusan (2 Nagari),
- ✓ Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Sutera (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Ranah Pesisir (1 Nagari)
- ✓ Kecamatan Airpura (1 Nagari).

Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi :

- ✓ Kecamatan Koto XI Tarusan (4 Nagari),
- ✓ Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (2 Nagari)
- ✓ Kecamatan Bayang (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan IV Jurai (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Sutera (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Lengayang (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Ranah Pesisir (2 Nagari),
- ✓ Kecamatan Linggo Sari Baganti (2 Nagari),
- ✓ Kecamatan Air Pura (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Pancung Soal (4 Nagari),
- ✓ Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (1 Nagari),
- ✓ Kecamatan Lunang (1 Nagari).

Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat di

- ✓ Kecamatan Koto XI Tarusan (9 Nagari),
- ✓ Kecamatan Bayang (3 Nagari),
- ✓ Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (2 Nagari),
- ✓ Kecamatan IV Jurai (6 Nagari),
- ✓ Kecamatan Batang Kapas (5 Nagari),
- ✓ Kecamatan Sutera (7 Nagari),
- ✓ Kecamatan Lengayang (7 Nagari)
- ✓ Kecamatan Ranah Pesisir (6 Nagari),

- ✓ Kecamatan Linggo Sari Baganti (13 Nagari),
- ✓ Kecamatan Air Pura (5 Nagari),
- ✓ Kecamatan Pancung Soal (3 Nagari),
- ✓ Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (7 Nagari),
- ✓ Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (8 Nagari),
- ✓ Kecamatan Lunang (6 Nagari),
- ✓ Kecamatan Silaut (2 Nagari)

Kecamatan yang berada pada prioritas 4 di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat di Kecamatan antara lain :

- ✓ Kecamatan Koto XI Tarusan (8 Nagari),
- ✓ Kecamatan Bayang (14 Nagari)
- ✓ Kecamatan IV Jurai (13 Nagari),
- ✓ Kecamatan Batang Kapas (4 Nagari),
- ✓ Kecamatan Sutera(3 Nagari),
- ✓ Kecamatan Lengayang (1 Nagari)
- ✓ Kecamatan Ranah Pesisir (1 Nagari).
- ✓ Kecamatan Linggo Sari Baganti (2 Nagari)
- ✓ Kecamatan Air pura (2 Nagari)
- ✓ Kecamatan pancung Soal (3 Nagari)
- ✓ Kecamatan BAB Tapan (4 Nagari)P
- ✓ Kecamatan Lunang (4 Nagari)
- ✓ Kecamatan Silaut (7 Nagari)

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah, dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama kerawanan pangan seperti yang digambarkan dalam melalui pendekatan jalur ganda (*twin-track approaches*) yaitu :

1. Pendekatan jangka pendek

Membangun ekonomi berbasis pertanian untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan

2. Pendekatan jangka menengah dan panjang

Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 2 Upaya Menghapus Kerawanan Pangan Dengan Menghapuskan Akar Permasalahannya

Nagari yang rentan terhadap kerawanan pangan dan termasuk katagori 1 secara umum disebabkan :

1. Keterbatasan indikator yang mewakili aspek ketersediaan pangan (warung dan toko).
2. Sebaran Jumlah warung/ Toko pada setiap nagari yang tidak merata, ini disebabkan diantaranya :

- a. Tersedianya akses penghubung (jalan) yang lancar menuju pasar kecamatan atau pasar kabupaten
 - b. Kecenderungan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok ke pasar karena terdapat perbedaan harga yang tinggi.
3. Tersedianya kebutuhan pokok di rumah tangga hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan dan pemanfaatan lahan perkarangan sehingga mengakibatkan lemahnya pemanfaatan warung sebagai sarana pemanfaatan kebutuhan pangan.

Dan pada umumnya dapat disimpulkan bahwa nagari yang mengalami rentan terhadap pangan pada prioritas 1 dapat dikategorikan tidak termasuk nagari rawan pangan ini dapat dilihat dari data indikator pemanfaatan pangan yaitu : rendahnya jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan, rendahnya jumlah penderita gizi buruk, dan tersedianya sarana/ fasilitas kesehatan yang memadai pada setiap nagari. Ini mencerminkan bahwa masyarakat pada setiap nagari memiliki akses terhadap pemanfaatan ketersediaan pangan yang cukup, baik pangan yang diperoleh dari warung/ toko maupun pangan yang diperoleh dari hasil produksi sendiri.

Tabel 13 Karakteristik Masing-masing Prioritas serta Strategi Penanganannya

No	Prioritas	Faktor Penentu	Strategi Penanganan*	Program Daerah*
1	Prioritas 1	Akses Jalan	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	1. Mengupayakan penambahan infrastruktur kewilayahan 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana transportasi terpadu ditingkat wilayah
		Akses Listrik	1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan listrik	1. Mengupayakan penambahan daya listrik melalui PLN; dan 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya listrik alternatif.
		Fasilitas Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan masyarakat	1. Mengupayakan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis 2. Mengupayakan penambahan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu 3. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya air bersih yang terjamin
		Jumlah Warung/ Toko	1. Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Mengupayakan peningkatan ketersediaan pangan kepada masyarakat 2. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat 3. Mendorong pengembangan ketersediaan pangan yang ada di masyarakat
2	Prioritas 2	Fasilitas Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan masyarakat	1. Mengupayakan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis 2. Mengupayakan penambahan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu 1. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya air bersih yang terjamin

No	Prioritas	Faktor Penentu	Strategi Penanganan*	Program Daerah*
		Jumlah Warung/ Toko	1. Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Mengupayakan peningkatan ketersediaan pangan kepada masyarakat 2. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat 3. Mendorong pengembangan ketersediaan pangan yang ada di masyarakat
		Gizi Buruk	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	1. Intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. 2. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, dan untuk anak di bawah lima tahun.
		Perempuan Buta Huruf	1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan dan pengembangan cakupan pendidikan melalui: - Pembebasan biaya operasional pendidikan, - Peningkatan cakupan pendidikan dasar, - Peningkatan kualitas pendidikan menengah, - Dukungan terhadap perguruan tinggi, - Peningkatan cakupan pendidikan formal - Pengarusutamaan gender - Peningkatan kualitas moral dan akhlak.
		Akses Jalan	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	1. Mengupayakan penambahan infrastruktur kewilayahan 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana transportasi terpadu ditingkat wilayah
3	Prioritas 3	Kemiskinan	1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat pedesaan; 2. Mengembangkan pariwisata bahari nasional di kawasan Pesisir Selatan;

No	Prioritas	Faktor Penentu	Strategi Penanganan*	Program Daerah*
				3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agro bisnis dan agro industri; 4. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil, dan daerah terisolir; 5. Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan pedesaan
		Perempuan Buta Huruf	1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan dan pengembangan cakupan pendidikan melalui: - Pembebasan biaya operasional pendidikan, - Peningkatan cakupan pendidikan dasar, - Peningkatan kualitas pendidikan menengah, - Dukungan terhadap perguruan tinggi, - Peningkatan cakupan pendidikan formal - Pengarusutamaan gender - Peningkatan kualitas moral dan akhlak.
		Fasilitas Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan masyarakat	1. Mengupayakan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis 2. Mengupayakan penambahan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu 3. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya air bersih yang terjamin
		Jumlah Warung/ Toko	1. Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Mengupayakan peningkatan ketersediaan pangan kepada masyarakat 2. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat 3. Mendorong pengembangan ketersediaan pangan yang

No	Prioritas	Faktor Penentu	Strategi Penanganan*	Program Daerah*
				ada di masyarakat
		Gizi Buruk	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	1. Intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. 2. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, dan untuk anak di bawah lima tahun.



Painan, 29 Desember 2017
 Kepala Dinas Pangan
 Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
 NIP. 19700731 1994003 1 004

